

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi Sektor Publik

Dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga lembaga pemerintah, perusahaan milik negara/daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya dibandingkan dengan pada masa masa sebelumnya. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga lembaga sektor publik. Organisasi sektor publik saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya social, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Berbagai tuntutan tersebut menyebabkan akuntansi dapat dengan cepat diterima dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan urusan publik. Akuntansi sektor publik pada awalnya merupakan aktivitas yang terspesialisasi dari suatu profesi yang relatif kecil. Namun demikian, saat ini akuntansi sektor publik sedang mengalami proses untuk menjadi disiplin ilmu yang lebih dibutuhkan dan substansial keberadaanya. Istilah sektor publik sendiri memiliki pengertian yang bermacam macam, hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum

dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda beda (Mardiasmo, 2005: 1)

2.1.1.1 Sifat Dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2005) akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan (*purposive activity*), tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil yang tertentu, dan hasil tersebut harus memiliki manfaat, Akuntansi digunakan baik pada sektor swasta maupun sektor publik untuk tujuan tujuan yang berbeda. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan turbulence.

2.1.2 Good Corporate Governance

Corporate governance sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. *The Indonesian Institute For Corporate Governance* (IICG) Mendefinisikan GCG sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak petaruh lainnya. Selain pemenuh kepentingan para pemegang saham, GCG dimaksudkan untuk menjamin *sustainability*, ada dua sudut pandang dalam mendefinisikan GCG yaitu sudut pandang dalam arti sempit (*narrow view*) dan

sudut pandang dalam pengertian lebih luas (*broad view*). Dalam sudut pandang yang sempit, GCG diartikan sebagai hubungan yang setara antara perusahaan dan pemegang saham. Sedang pada pandangan yang lebih luas, GCG sebagai *web of realionship* tidak hanya perusahaan dengan pemilik atau pemegang saham akan tetapi perusahaan dengan pihak petaruh (*stakeholders*) lain yaitu: karyawan, pemasok, *bondholders* dan lainnya.

Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris/dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Pasal 1 Surat KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tgl 31 Juli 2002 tentang penerapan GCG pada BUMN, menyatakan bahwa *Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika (Kusmayadi et al., 2015).

GCG dapat menjadi salah satu kunci sukses suatu perusahaan untuk tumbuh dan berkembang dalam jangka waktu yang panjang. GCG adalah suatu sistem bagaimana suatu organisasi dikelola dan dikendalikan dengan baik. Dalam

sistem antara lain yang mengatur bagaimana tata cara pengambilan keputusan pada tingkat atas organisasi, mengatur hubungan antara dewan komisaris, direksi, manajemen, serta kepemilikan manajerial (Syofyan, 2021: 105). Konsep *Good Corporate Governance* memiliki tujuan untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan resiko secara lebih efektif dan efisien, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dari organisasi perusahaan demi menjaga kepentingan para *shareholder* dan *stakeholder* perusahaan, meningkatkan kontribusi perusahaan (khususnya perusahaan-perusahaan pemerintah) terhadap perekonomian nasional, meningkatkan investasi nasional, serta untuk mensukseskan program privatisasi perusahaan-perusahaan pemerintah (Ardiani et al., 2017).

2.1.2.1 Komite Audit

Menurut Syofyan (2021: 24) Komite Audit merupakan suatu badan yang dibentuk oleh dewan komisaris dari perusahaan yang tugasnya adalah untuk melakukan fungsi pengawasan dan menjaga independensi akuntan pemeriksa internal terhadap tim manajemen sesuai dengan prinsip GCG. Pembentukan Komite Audit relatif masih baru di Indonesia, meskipun di beberapa negara lain sudah dilaksanakan sejak beberapa tahun yang lalu. Komite Audit berperan dalam upaya perlindungan terhadap kepentingan berbagai pihak (*stakeholders*) dan peningkatan proses komunikasi dalam perusahaan. Komite Audit dibentuk dalam rangka optimalisasi kinerja Dewan Komisaris. Suatu Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris mempunyai anggaran dasar komite audit,

komposisi (Composition) keanggotaan komite audit paling kurang tiga orang yang terdiri dari dewan komisaris independen yang berasal dari luar organisasi.

2.1.2.2 Indikator Komite Audit

Komite audit adalah auditor internal yang dibentuk dewan komisaris, yang bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan pengendalian intern perusahaan. Dalam mengatur Komite Audit pada perusahaan tercatat dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkenaan dengan : jumlah dan kualifikasi keanggotaan, tugas, jenis laporan yang dihasilkan dan penentuan pihak-pihak yang berhak atas laporan tersebut serta kewajiban untuk memuat informasi mengenai kegiatan Komite Audit pada laporan tahunan perusahaan, berdasarkan penjelasan diatas komite audit sangat berpengaruh bagi GCG dan jumlah anggota merupakan peranan penting dalam menjalani struktur GCG. Indikator yang digunakan untuk mengukur komite audit adalah jumlah anggota komite audit pada perusahaan sampel (Syofyan, 2021: 25) .

KA = Jumlah anggota komite audit

2.1.2.3 Ukuran Dewan komisaris

Dewan komisaris merupakan mekanisme pengendalian internal tertinggi yang bertanggungjawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak komposisi individu yang bekerja sebagai anggota dewan komisaris merupakan hal penting dalam memonitor aktivitas manajemen secara efektif, mengingat manajemen yang bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya

saing perusahaan sedangkan dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen, maka dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan. Ukuran dewan komisaris adalah jumlah anggota dewan komisaris, Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan Chief Executive Officer (CEO) dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif (Nurfadilah .W, 2015: 19).

2.1.2.4 Indikator Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Pembentukan dewan komisaris adalah salah satu mekanisme yang banyak dipakai untuk memonitor manajer. Hal ini penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan manajemen laba yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor, dalam pengaruhnya ukuran dewan komisaris memiliki hasil yang bergaram salah satunya ialah semakin banyaknya personel yang menjadi dewan komisaris dapat berakibat pada makin buruknya kinerja yang dimiliki perusahaan. Tetapi jumlah dewan komisaris jangan dijadikan acuan pada peneliti sebab apabila jumlah dewan komisaris sedikit maka tindak kecurangan makin banyak karena sedikitnya dewan komisaris memungkinkan bagi organisasi tersebut untuk didominasi oleh pihak manajemen dalam menjalankan perannya Indikator yang digunakan untuk mengukur Ukuran Dewan Komisaris adalah jumlah anggota Ukuran Dewan Komisaris (M. Nasrun, 2018: 56) .

UDK = Jumlah anggota dewan komisaris

2.1.2.5 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan Manajerial (insider ownership) merupakan kepemilikan saham terbesar oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki manajemen, hal ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan. Bagian hak kepemilikan saham manajerial ini diberikan oleh pemegang saham dengan harapan bahwa para pengelola perusahaan dapat lebih memiliki sense of belonging sehingga loyalitas, dedikasi, dan produktivitasnya bisa lebih meningkat terhadap perusahaan (Wirdani Isma, 2018: 29). Dengan adanya kepemilikan perusahaan oleh manajerial diharapkan menimbulkan isu bahwa kinerja perusahaan akan semakin meningkat karena manajemen yang bisa memonitoring pertumbuhan perusahaan secara langsung. Jika jumlah saham yang dimiliki oleh manajer meningkat, maka mereka akan bertindak lebih berhati-hati karena mereka juga akan menanggung konsekuensi dalam keputusan yang diambilnya. Selain itu, manajer akan termotivasi dalam meningkatkan pengelolaan perusahaannya.

2.1.2.6 Indikator Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan saham manajerial adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh eksekutif dan direktur, Prosentase kepemilikan ditentukan oleh besarnya prosentase jumlah saham terhadap keseluruhan saham perusahaan. Seseorang

yang memiliki saham suatu perusahaan dapat dikatakan sebagai pemilik perusahaan walaupun jumlah sahamnya hanya beberapa lembar saja, Berbagai kebijakan keuangan yang optimal, baik itu terkait dengan masalah struktur permodalan (*capital structure*) maupun kebijakan mengenai dividen (*dividend policy*) akan mampu meningkatkan kesejahteraan pemilik, tujuan ini akan mampu mengurangi terjadi konflik antara manajemen dengan para pemilik dengan melibatkan mereka dalam struktur kepemilikan perusahaan. Dengan melibatkan mereka (manajemen) maka diharapkan mampu meningkatkan kinerja, karena mereka selain memperoleh kompensasi gaji yang memadai, juga memiliki ekspektasi perolehan dividen dari prospek pertumbuhan perusahaannya. Dalam konteks ini apabila presentase kepemilikan manajerial meningkat memiliki efek positif bagi perusahaan yang artinya jumlah kepemilikan manajerial bisa berefek terhadap struktur GCG, indikator pada kepemilikan ialah jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen (manajerial) (Suteja, 2020: 22).

$$KM = \frac{\text{Saham Manajerial}}{\text{Saham Beredar}} \times 100\%$$

2.1.2.7 Kepemilikan Institusional

Menurut Maftukhah (2013) Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Kepemilikan saham institusional ini biasanya merupakan saham yang dimiliki oleh perusahaan lain

yang berada didalam maupun diluar negeri serta saham pemerintah dalam maupun luar negeri. Kepemilikan saham institusi akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja insider dan akan berdampak pada peningkatan keuntungan perusahaan, menyebabkan nilai perusahaan (PER) akan meningkat juga. Saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan kepemilikan oleh *blockholder* yaitu kepemilikan individu atau atas nama perorangan diatas kepemilikan 5 % tetapi tidak termasuk kedalam golongan kepemilikan insider. Investor institusional tersebut seperti perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi maupun kepemilikan lembaga dan perusahaan lain. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal.

2.1.2.8 Indikator Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Saham Institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor institusional. Investor institusional mencakup bank, dana pensiun, perusahaan asuransi, perseroan terbatas dan lembaga keuangan lainnya, dalam kepemilikan institusional terjadi peningkatan persentase investor institusional dapat menghalangi perilaku opportunistik manajer dimana keterlibatan mereka akan mampu meningkatkan nilai perusahaan khususnya saat terjadi pengambilalihan atau take-over. Presentase disini bisa kita simpulkan

menjadi jumlah saham yang di miliki pihak luar, apabila presentase jumlah saham meningkat pada perusahaan bisa berdampak pada nilai perusahaan itu sendiri (Suteja, 2020: 60).

$$KI = \frac{\text{Saham Institusional}}{\text{Saham Beredar}} \times 100\%$$

2.1.2.9 Prinsip Prinsip Pada *Good Corporate Governance*

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu *transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi* serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan. Menurut Kusmayadi et al (2015: 41) untuk memudahkan memberikan gambaran bagaimana prinsip-prinsip GCG tersebut akan dibangun, dipahami dan dilaksanakan, berikut ini diberikan beberapa acuan praktis yang perlu dikembangkan lebih lanjut di masing-masing perusahaan:

1. Akuntabilitas (*Accountability*)
2. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)
3. Keterbukaan (*Transparancy*)
4. Kewajaran (*Fairness*)
5. Kemandirian (*Independency*)

2.1.2.10 Hubungan Variable Independen Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility

Pada penelitian yang dilakukan Yustian et al., (2011) dan Nurfadilah .W, (2015) memiliki kesimpulan bahwa komite audit serta ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, untuk komite audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta komite audit juga dapat dijadikan instrument untuk meningkatkan luasnya pengungkapan corporate social responsibility. Dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi, yang bertanggungjawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Ukuran dewan komisaris dilihat dari anggota nya, artinya bahwa semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan, maka pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuat perusahaan akan semakin luas. Etty Murwaningsari (2009) Dalam penelitiannya mengenai hubungan *Corporate Governance, Corporate Social Responsibilities* dan *Corporate Financial Performance* Dalam Satu Continuum, menyimpulkan bahwa pengaruh kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap CSR ialah positif, apabila kepemilikan manajerial naik maka kenaikan kepemilikan manajerial akan meningkatkan pengungkapan perusahaan terhadap corporate social responsibility begitu pun dengan kepemilikan institusional dimana dengan peningkatan saham institusioanal akan meningkatkan

pengungkapan perusahaan terhadap corporate social responsibility, hal ini akan meningkatkan nilai perusahaan di mata para investor.

2.1.3 Corporate Social Responsibility

Corporate Sosial Responsibility (CSR) adalah bentuk tanggung jawab dari setiap perusahaan terhadap lingkungan terutama kemungkinan kerusakan lingkungan yang semakin parah, sehingga anak cucu kita kelak tidak semakin menanggung beban yang lebih berat dibandingkan dengan generasi sekarang. Pengungkapan adalah pengeluaran informasi yang ditujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan dari pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah agar perusahaan dapat menyampaikan tanggung jawab sosial yang telah dilaksanakan perusahaan dalam periode tertentu. Penerapan *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* dapat diungkapkan perusahaan dalam media laporan tahunan (*annual report*) perusahaan yang berisi laporan tanggung jawab sosial perusahaan selama kurun waktu satu tahun berjalan (Leksono & Butar, 2018). *Corporate Sosial Responsibility (CSR)*, sebagai suatu tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat, Dalam Implementasi *Corporate Sosial Responsibility* sudah menjadi bagian yang terintegasi dalam tujuan bisnis, dan dalam menetapkan kebijakan suatu perusahaan, yang mana dunia bisnis tidak hanya sebagai organisasi yang berorientasi pada profit, akan tetapi memiliki kesadaran sosial terhadap lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut berada.

2.1.3.1 Konsep Dasar Corporate Social Responsibility

Menurut Situmeang Oisina V.I (2016: 8) dasar dari konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini ialah, mengernbangkan konsep *triple bottom lines* dalam istilah *econormic prosperity, evironmental quality, social justice*. Perusahaan yang ingin berkelanjutan harus memikirkan 3P (*profit, people, planet*), yaitu selain mengejar keuntungan (*profit*), perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Hubungan yang ideal antara profit (keuntungan), *people* (masyarakat) dan *planet* (lingkungan) adalah seimbang, tidak bisa mementingkan satu elemen saja. Konsep 3P ini dapat menjamin keberlangsungan bisnis perusahaan. Hal ini dapat dibenarkan, sebab jika suatu perusahaan hanya mengejar keuntungan semata, bisa jadi lingkungan yang rusak dan masyarakat yang terabaikan menjadi hambatan kelangsungan bisnisnya. Bebrapa perusahaan bahkan menjadi terganggu aktivitasnya karena tidak mampu menjaga keseimbangan 3P ini.

2.1.3.2 Indikator Corporate Social Responsibility

Instrumen pengukuran *Corporate social responsibility disclosure index* (CSRDI) mengelompokkan informasi CSR ke dalam kategori: Lingkungan, Energi, Tenaga Kerja, Produk, Keterlibatan Masyarakat, dan Umum, total item CSR berkisar antara 63 sampai dengan 78, tergantung dari jenis industri perusahaan (Sayekti .Y & L.S, 2007). *Content analysis* adalah salah satu metode pengukuran CSRDI yang sudah banyak digunakan dalam penelitian-penelitian

sebelumnya. Pendekatan ini pada dasarnya menggunakan pendekatan dikotomi yaitu setiap item CSR dalam instrumen penelitian diberi nilai 1 jika diungkapkan, dan nilai 0 jika tidak diungkapkan. Selanjutnya, skor dari setiap item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan (Nurkhin A, 2009: 47). Rumus perhitungan CSRDI adalah sebagai berikut:

$$\text{CSRI}_j = \frac{\sum X_{ij}}{N_j}$$

keterangan:

CSRI_j : Corporate Social Responsibility Disclosure Index perusahaan j.

n_j : jumlah item untuk perusahaan j, n_j ≤ 78.

X_{ij} : dummy variable: 1 = jika item i diungkapkan; 0 = jika item i tidak diungkapkan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul penelitian jurnal, volume,nomor, tahun	Variable yang diteliti, alat analisis, hasil penelitian	persamaan	perbedaan
1.	Susni Ardiani, Evada Dewata, Sandrayati, Meilinda Mila Afsari	“ Pengaruh <i>good corporate governance</i> terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa pada pt semen baturaja tbk palembang ” Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis.	Variable : Good Corporate Governance dan Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik. Alat analisis : Analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian : menunjukkan bahwa secara parsial penerapan GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa secara elektronik(E-	* Objek penelitian sama sama di pt semen baturaja TBk * Alat analisis yang digunakan sama sama Regresi linier berganda	* Lokasi yang diteliti

		Vol. 5, No. 2, December 2017, 228-241 E-ISSN: 2548-9836	procurement), sedangkan secara simultan penerapan GCG berpengaruh terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa secara elektronik (E-procurement).		
2.	Elvi Fauzia & Indra Arifin Djashan	“ Pengaruh <i>good corporate governance</i> dan karakteristik perusahaan terhadap nilai perusahaan non-keuangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia “ Jurnal Bisnis Dan Akuntansi. Vol. 21, No. 1a-1, Nov 2019, Hlm. 109-120. P-ISSN: 1410 – 9875 E-ISSN: 2656 – 9124	Variable : Nilai perusahaan, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, komisaris perusahaan, profitabilitas, kepemilikan institusional, dan nilai perusahaan non-keuangan Alat Analisis : Analisis Regresi Berganda. Hasil penelitian : menunjukkan bahwa profitabilitas (ROE) berpengaruh terhadap nilai perusahaan. sedangkan kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan ukuran dewan tidak berpengaruh.	* Alat analisis yang digunakan sama sama Regresi berganda * Dalam penelitian terdahulu ini menggunakan variable Good Corporate Governace	* Objek dan lokasi yang diteliti * Pemilihan sample berbeda menggunakan purposive sampling

3.	Eddy R. Sembiring	<p>“ Analisis pengaruh <i>good corporate governance</i> terhadap <i>corporate social responsibility</i> “</p> <p>JRAK – Vol. 6 No. 2, September 2020</p> <p>ISSN : 2443 - 1079</p>	<p>Variable :</p> <p>Untuk variable penelitian ini ada dependen dan independen, variable dependen: lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat, dan umum dan variable independen: ukuran dewan komisaris, direktur independen, direktur perempuan, konsentrasi kepemilikan dan komisaris independen</p> <p>Alat Analisis : Analisis Regresi linier Berganda.</p> <p>Hasil Penelitian : menunjukkan bahwa secara simultan variabel ukuran dewan komisaris, direktur independen, direktur perempuan, konsentrasi kepemilikan dan Komisaris independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab</p>	<p>* Pada penelitian bagian variable independen nya memiliki kesamaan dalam penelitian, yaitu: ukuran dewan komisaris dan kepemilikan manajerial serta variable depeden sama sama fokus terhadap dampak sekitar perusahaan baik itu lingkungan, kesejahteraan masyarakat dan kesehatan</p> <p>* Alat analisis yang digunakan sama sama Regresi linier berganda</p>	<p>* Objek dan lokasi yang di teliti</p> <p>* penelitian ini pada variable independen ada variable direktur independen dan direktur perempuan</p>
----	-------------------	--	---	--	---

			<p>sosial perusahaan, sedangkan secara parsial hanya variabel ukuran dewan komisaris yang berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan variabel direktur independen, direktur perempuan, konsentrasi kepemilikan dan Komisaris independen mempunyai pengaruh yang tidak signifikan.</p>		
4.	<p>Ni Kadek Desy Sulestiana Dewi, Luh Komang Merawati, Daniel Raditya Tandio</p>	<p>“ Pengaruh struktur kepemilikan, komite audit, profil perusahaan dan rasio aktivitas terhadap pengungkapan <i>corporate social responsibility (csr)</i> “</p> <p>Jurnal Kharisma.</p> <p>VOL. 3 No. 1, Februari 2021</p> <p>E-ISSN 2716-2710</p>	<p>Variable :</p> <p>Kepemilikan manajerial, kepemilikan saham publik, komite audit, profil perusahaan dan pengungkapan terhadap CSR.</p> <p>Alat analisis :</p> <p>Analisis regresi linier berganda.</p> <p>Hasil penelitian :</p> <p>menunjukkan bahwa kepemilikan manajemen adalah diproksikan dengan persentase saham yang dimiliki oleh manajemen, kepemilikan saham publik diproksikan dengan</p>	<p>* Alat analisis yang digunakan sama sama Regresi linier berganda</p> <p>* Pada penelitian terdahulu ini sama sama menggunakan kepemilikan manajerial, kepemilikan saham publik, komite audit, profil perusahaan sebagai variable independen serta pengungkapan terhadap CSR sebagai dependen</p>	<p>* Objek dan lokasi yang diteliti</p>

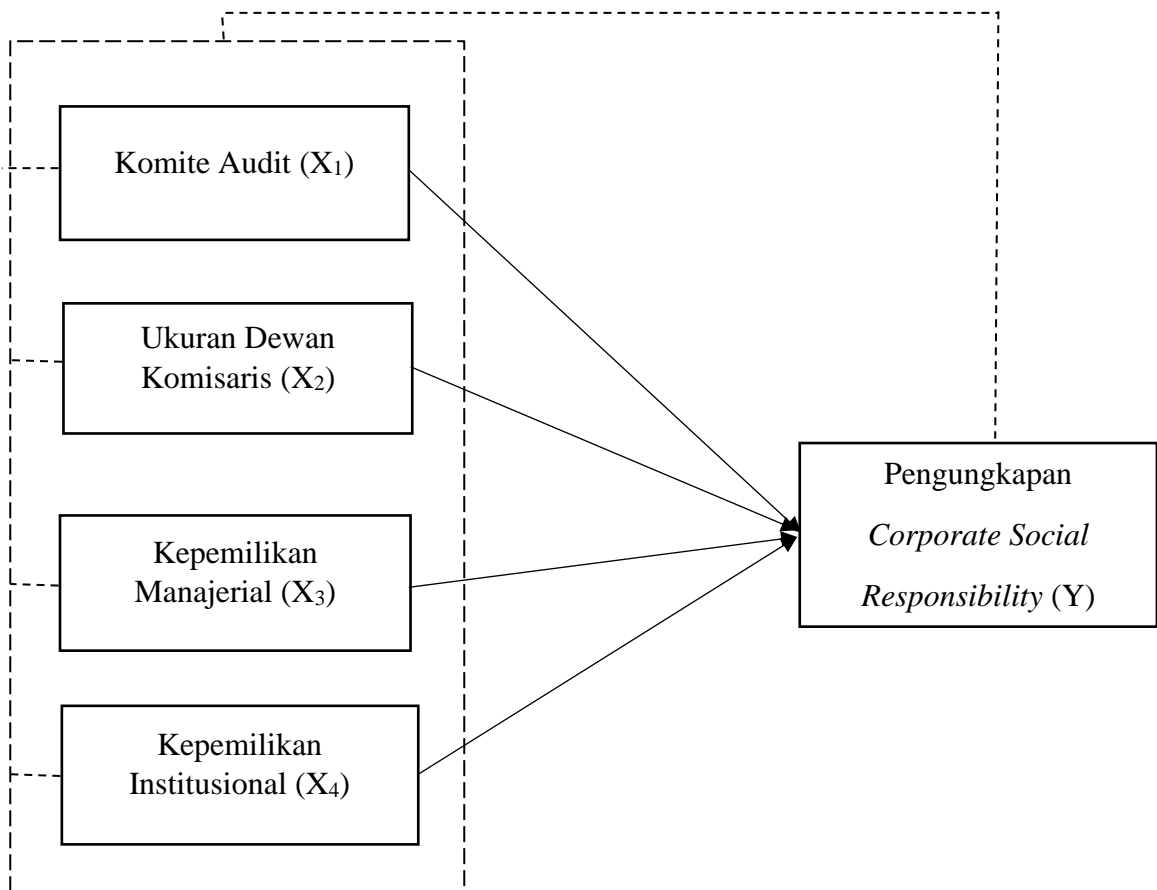
			<p>persentase kepemilikan saham perseroan oleh masyarakat terhadap jumlah saham yang beredar, perseroan profil yang diproksikan dengan variabel dummy, dan rasio aktivitas yang diproksikan dengan total asset turnover tidak berpengaruh</p> <p>pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sedangkan komite audit diproksikan dengan jumlah audit anggota komite berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.</p>		
5.	Arifur Khan, Mohammad Badrul Muttakin, Javed Siddiqui	<p><i>“Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosures: Evidence from an Emerging Economy “</i></p> <p><i>Journal of Business Ethics</i></p>	<p>Variable : Kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, kepemilikan asing, independensi dewan, dualitas peran dan komite audit</p> <p>Hasil Penelitian : Studi ini memberikan hasil yang menunjukkan bahwa tekanan</p>	* Pada penelitian ini sama-sama menggunakan variable <i>Corporate Governance and Corporate Social Responsibility</i>	* Lokasi dan objek yang diteliti

		<i>J Bus Ethics</i> (2013) 114:207–223 DOI 10.1007/s10551-012-1336-0	dilakukan oleh kelompok pemangku kepentingan eksternal dan perusahaan mekanisme tata kelola yang melibatkan pihak luar yang independen mungkin menghilangkan beberapa kekhawatiran yang berkaitan dengan pengaruh keluarga pada praktik pengungkapan CSR. Secara keseluruhan, penelitian kami menyiratkan hal itu atribut tata kelola perusahaan memainkan peran penting dalam memastikan legitimasi organisasi melalui pengungkapan CSR. Itu temuan penelitian kami harus menarik bagi regulator dan pembuat kebijakan di negara-negara yang memiliki kesamaan perusahaan kepemilikan dan struktur peraturan.		
6.	Martin Kyere & Marcel Ausloos	<i>“Corporate governance and firms financial performance</i>	Variable : Tata kelola perusahaan, kinerja keuangan, laba atas aset	* Variable pada penelitian ini menggunakan tata kelola perusahaan	* Lokasi dan objek yang diteliti

		<p><i>in the United Kingdom”</i></p> <p><i>International Journal of Finance & Economics published</i></p>	<p>Hasil penelitian :</p> <p>Kesimpulan diambil dari empiris tes yang dilakukan pada 252 perusahaan yang terdaftar di London Stock Exchange untuk tahun tersebut 2014 menunjukkan hubungan positif atau negatif, tetapi terkadang juga tidak efek, mekanisme tata kelola perusahaan berdampak pada kinerja keuangan. Implikasinya dibahas, dengan demikian agar dapat membedakan efek akibat sebab-sebab, kami hadirkan bukti bahwa, bila mekanisme tata kelola perusahaan benar dipilih, keuangan perusahaan dapat ditingkatkan. Hasil penelitian ini harus memiliki beberapa implikasi pada pemikiran akademisi dan pembuat kebijakan.</p>		
--	--	---	--	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sujawerni Wiratna .V (2015: 66) kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variable yang akan diteliti maka variabel dependen adalah pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Y) dan variable independen adalah Komite Audit (X_1), Ukuran Dewan Komisaris (X_2), Kepemilikan Manajerial (X_3), Kepemilikan Institusional (X_4). Gambar kerangka pemikiran ini dapat lebih jelas dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Ket: —————▶ : Secara persial
 - - - - - : Secara simultan

2.4 Hipotesis

Menurut Sumadi Suryabrata (1991:49) Secara teknis, hipotesis adalah pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disajikan tersebut, maka hipotesis penelitian yang dapat disimpulkan dari asumsi diatas adalah sebagai berikut:

H₁ : Diduga adanya pengaruh Komite Audit terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

H₂ : Diduga adanya pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

H₃ : Diduga adanya pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

H₄ : Diduga adanya pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

H₅ : Diduga adanya pengaruh komite Audit, Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.